



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 909/V/V/2016



**Komisi V DPR Minta Maskapai Penerbangan
Benahi Manajemen**

**Ketua DPR Beri Penghargaan
Pada Polisi Jujur**

**Isu PNPB Jadi Tema Workshop
Pusat Kajian Anggaran DPR**

GRATIS
Tidak Diperjualbelikan

Komisi V DPR Minta Maskapai Penerbangan Benahi Manajemen

Sebagian besar anggota Komisi V DPR meminta PT Lion Mentari Airlines untuk segera melakukan pembenahan manajemen. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki pelayanan ke depannya.

Anggota Komisi V dari Fraksi Golkar Hamka Baco Kadi menilai, permasalahan yang mewarnai pelayanan Lion Air selama ini bersumber dari internal perusahaan. Menurutnya, perbaikan total harus segera dilakukan.

"Kalau kita bicara delay, ada satu proses. Bukan masalah maskapai. Internal harus diperbaiki. Karyawan belum siap dan tidak mau belajar," kata Hamka saat Komisi V melakukan RDP dengan manajemen, karyawan, pilot dan pramugari Lion Air, di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/5).

Sebaliknya, anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Hariyani menilai rakyat membutuhkan Lion Air karena pemerintah belum menjawab kebutuhan soal penerbangan.

Kendati demikian, kesejahteraan karyawan, khususnya pramugari dan pilot sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu perlu diperhatikan.

"Ya mbok pilot sama pramugarinya harus diperhatikan. Bapak (manajemen Lion Group-red) besar karena mereka loh. Itu harus jadi prioritas manajemen Lion, perbaiki semua sisi," tutur dia.

Ia pun mengimbau agar Lion Group tidak usah panik dengan teguran yang disampaikan pemerintah. Apalagi mengambil langkah melaporkan Dirjen Kemenhub ke Bareskrim Mabes Polri. "Semua demi perbaikan," imbuhnya.

Anggota Fraksi Gerindra Novita Wijayanti berharap agar Lion Air bisa memperbaiki apa yang jadi kesalahannya hingga akhirnya mendapat sanksi tegas dari Kemenhub.

"Betul masyarakat sangat membutuhkan Lion Air. Harapan saya ke depan Lion Air jadi harapan masyarakat, dengan tiket murah jangan sampai servicenya rendah. Jangan roknnya saja yang

rendah," pungkasnya.

Yosef Umar Hadi, anggota Komisi V dari Fraksi PDIP menyatakan ia dan semua anggota Komisi V menyesalkan atas kejadian beberapa waktu lalu, dan jangan membuat pihak Lion Air patah semangat namun bisa mengambil hikmahnya.

"Kita semua harus sama-sama saling introspeksi dan mencari mana-mana yang masih lemah, kita semua tentunya tidak sempurna, apakah itu pilot, pramugari, direksi, karyawan termasuk regulator pasti mempunyai kelemahan, jangan terus saling menyalahkan, harus dengan kepala dingin, dan ambil hikmahnya," harap Yosef.

"Kami juga berharap penerbangan di Indonesia ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu yang penting, baik regulator maupun operator kita harus menguasai dan memiliki. Kita tidak boleh menjadi tamu di negeri sendiri, jangan sampai kesempatan ini di manfaatkan pihak lain untuk mengadu domba," tambahnya.

Usai rapat, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Prancis di hadapan wartawan menjelaskan, Komisi V DPR telah mencatat aspirasi, rekomendasi yang telah dikemukakan oleh pihak manajemen Lion Air, dan kemudian nanti akan

membawanya dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Udara.

Fary pun menegaskan, bahwa dalam hal ini posisi Komisi V DPR mengacu pada UU dan fokus kepada hasil rekomendasi dari Panja Keselamatan Keamanan dan Kualitas Penerbangan Nasional.

"Namun tentunya, yang perlu ditekankan, pesan dari kami di Komisi V DPR bahwa kita mencintai Lion Air dalam rangka memberikan pembelaan, tidak dalam rangka untuk membinasakan. Terlebih berkaitan dengan maskapai penerbangan yang telah memberikan dukungan penuh terhadap bangsa dan negara kita," harap Fary.

Sementara itu, dalam penjelasannya dihadapan Komisi V DPR Dirut Lion Air Edward Sirait menyampaikan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami juga sudah mencatat masukan dari anggota dewan yang terhormat, terkait perbaikan maupun panduan yang terkait dengan pengelolaan perusahaan. Kami akan pelajari dan sosialisasikan kedalam untuk perbaikan ke depannya," terang Edward. ■



Pimpinan & Anggota Komisi V DPR dan Dirut Lion Air jumpa pers, Selasa (24/5)

(ur) fotocandri/hr

Ketua DPR Himbau Semua Komponen Bangsa Wujudkan Kebangkitan Nasional Sesungguhnya

Mengenang spirit Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati pada Jum'at (20/5), Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak seluruh pihak agar menghadapi seluruh tantangan bangsa, supaya semangat kebangkitan nasional relevan dengan tuntutan zaman.

Akom sapaan akrab Ketua DPR, mengimbau untuk semua unsur bangsa agar bekerja bersama-sama mewujudkan kebangkitan nasional yang sesungguhnya. Apalagi saat ini, tantangan yang dihadapi Indonesia baik secara internal maupun eksternal semakin berat.

"Kita menghadapi banyak tantangan saat ini. Secara internal, di dalam negeri kita masih menghadapi banyak permasalahan. Perekonomian yang masih belum pulih, pembangunan infrastruktur yang masih belum merata, ancaman radikalisme dan terorisme serta persoalan sosial yang kian mengkhawatirkan," ungkap Akom, dalam rilis yang diterima Parlemenaria.

Akom menekankan, secara eksternal, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Kompetisi antara negara dalam kancah global semakin ketat. "Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia harus bangkit untuk menjadi bangsa yang kompetitif pada persaingan tingkat global tersebut," tandasnya.

Dia mengenang, semangat Kebangkitan Nasional yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908, harus menjadi landasan bagi seluruh pihak untuk mewujudkan

kebangkitan nasional secara lebih mutakhir.

Baginya kebangkitan Indonesia saat ini adalah menghadapi tantangan persaingan ekonomi global, ketimpangan pembangunan di beberapa daerah, serta ancaman kekerasan sosial dan terorisme.

saatnya lagi mengedepankan hal-hal yang sifatnya seremonial atau wacana yang tidak produktif. Saat ini, sebagaimana sering disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita

harus bekerja nyata mewujudkan kebangkitan nasional," tutur Akom.

Sebagai Ketua DPR, Akom juga akan mendorong DPR RI lebih produktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Menurutnya, DPR saat ini terus berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengelola negara dalam menghadapi



Ketua DPR RI Ade Komarudin

permasalahan-permasalahan bangsa.

"Sebagai Ketua DPR RI saya akan terus berkomitmen memperjuangkan kebangkitan nasional. Salah satunya dengan terus memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan pembangunan nasional," imbuh Akom. ■

(eko.mp) Foto: Jayadi/hr



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara Lt. Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murtidyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitan.dpr@gmail.com

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Masuki Usia 51 Tahun, Ketua DPR Tetap Akan Bekerja Lebih Maksimal

Ketua DPR RI Ade Komarudin berulang tahun ke 51, dirayakan secara sederhana di lantai II Gedung Nusantara III dihadiri rekan-rekan sejawat dan Sekjen DPR serta sejumlah pejabat Setjen DPR. Acara perayaan hari kelahiran politisi F-Golkar tersebut diawali dengan pembacaan do'a dan pemotongan nasi tumpeng, yang dilanjutkan dengan makan bersama dengan beberapa sahabat sesama politisi, serta para awak media yang biasa bertugas di Komplek Parlemen.

“Usia saya sekarang sudah 51 tahun, saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai Ketua DPR sampai tahun 2019. Sebagaimana komitmen saya sejak awal, bahwa tugas DPR yang tiga itu yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan akan di maksimalkan dengan baik,” kata Ade Komarudin, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (20/5).

Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, mengatakan bahwa dirinya bersama anggota Dewan yang lain akan bekerja secara produktif di bidang legislasi, dengan harapan dapat memenuhi tugas dan amanah dari rakyat Indonesia.



Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan kue kepada Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

"Ini merupakan tugas dan amanah dari rakyat, dan salah satu ukuran anggota DPR itu telah bekerja dengan baik adalah

dengan melakukan pekerjaan fungsi legislasi dan anggaran sebaik-baiknya dan secara maksimal," jelasnya.

Terkait urusan yang terjadi dalam partainya, Akom menyatakan bahwa ia mengalah bukan kalah, semua dilakukan demi rekonsiliasi serta persatuan partai yang kukuh. Hal itu merupakan satu sumbangan untuk persatuan nasional dan stabilitas politik serta kelancaran pembangunan nasional.

"Saya lakukan itu karena kita harus mendahulukan kepentingan negara, dan saya mencintai negara ini, mudah-mudahan diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Dan itu juga sebagai suatu pembelajaran bagi para tokoh-tokoh lain bahwa demokrasi itu harus indah, dan harus menghasilkan suatu keputusan yang tidak lonjong tapi bulat. ■

(depump) Foto: Jayadi, Rumi/hr

Lima Bulan Gaji Bambang Soesatyo Untuk Biaya Keluarga Polisi Jujur

Meski terkadang getir dan pahit bagi orang yang berlaku jujur, namun tak jarang buah dari kejujuran selalu berujung manis. Di tengah minimnya kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum, beberapa hari belakangan ini seorang polisi yang bertugas di Polres Malang Kota, Bripka Seladi menjadi buah bibir banyak orang.

Sampai-sampai Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo pun takjub dengan kerendahan hati polisi ini. Tidak hanya itu, polisi berpangkat Brigadir Kepala ini dinilai selalu mengedepankan integritas dan kejujuran. Polisi berusia 57 tahun lebih memilih menjadi pemulung daripada menerima suap saat bertugas. Mengetahui hal itu, Bambang mengapresiasi keteladanan polisi ini dengan menghibahkan gaji pokoknya sebagai anggota dewan selama lima bulan untuk Seladi.



Ketua DPR didampingi Bambang Soesatyo dan Bripka Seladi

"Saya ikhlaskan gaji saya mulai bulan ini sampai Desember buat bapak ini," ujar Bambang sesaat sebelum Ketua DPR Ade Komarudin memberikan penghargaan kepada polisi jujur ini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

Dewan dari dapil Jawa Tengah VII ini mengetahui bahwa Seladi mencari penghasilan tambahan tanpa

mengesampingkan tugas utamanya sebagai polisi. Penghasilan itu digunakan untuk keluarga dan anaknya yang tengah mendaftar di sekolah kepolisian. Ia berharap agar prosesnya lancar.

"Semoga putranya masuk di sekolah kepolisian, dan putra-putra lain. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat bagi keluarga," harapnya.

Demi membantu keuangan Briпка

Seladi dan keluarganya, Bambang mengikhlaskan gajinya hingga bulan Desember. Ia telah meminta Kesekretariatan DPR untuk mengurus prosesnya.

"Karena saya tadi mau potong gaji buat Briпка Seladi, saya minta Setjen untuk mengurus pemotongan dan pengiriman gaji saya sampai Desember kepada Briпка Seladi," pinta Bambang. ■

(eko) foto:runi/hr

Ketua DPR dan PIM Bahas Kemajuan Bangsa dan Pentingnya Literasi

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyambut baik kedatangan Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Gedung DPR, Jumat (20/5). Dalam pertemuan tersebut organisasi yang dipimpin oleh Din Syamsuddin ini, menyampaikan kepada Ketua DPR tentang basis pergerakan dan program aksi unggulan PIM.

Akom, begitu Ketua DPR biasa disapa, menyampaikan ungkapan persetujuannya terkait dengan basis filosofi dan program unggulan PIM. Dalam percakapan tersebut, Akom dan Din sama-sama memiliki perhatian khusus pada kemajuan bangsa dan menciptakan masyarakat yang sadar pada pentingnya literasi.

"Kalau soal filosofinya saya setuju. Karena pasti pikiran saya dan beliau sama, satu perguruan," ungkapnya sembari mengenang kisah saat masa kuliah di UIN Jakarta.

Pada pertemuan tersebut Ketua Dewan Nasional PIM, Din Syamsuddin memaparkan, bahwa PIM merupakan organisasi masa yang berbasis pada pergerakan kemajemukan yang ada di Indonesia. Menurutnya keberagaman penduduk nusantara jika dikelola dengan baik bisa menjadi sumber kekuatan Bangsa Indonesia.

"Kemajemukan bisa menjadi faktor kekuatan untuk kemajuan Indonesia," ujar Din. Dia juga menguraikan keanggotaan PIM terdiri dari warga negara Indonesia dari latar belakang lintas agama, lintas suku, dan profesi. Hal demikian sebagai upaya untuk

menggalang potensi-potensi yang ada pada kemajemukan warga negara Indonesia.

menyampaikan, PIM akan terlibat dengan aksi-aksi nyata di lapangan, terkait dengan kemanusiaan, kemasyarakatan

dan kebangsaan. Adapun program unggulan yang dia maksud berkenaan dengan desa pintar, di dalamnya terdapat taman bacaan sebagai pemberdayaan desa, dengan tujuan desa yang mandiri, maju dan mampu menghimpun potensi energi yang ada pada masyarakat desa.

Selanjutnya ada Rumah Aladin. Din menjelaskan, rumah aladin adalah rumah yang layak huni untuk masyarakat, terdiri dari unsur atap lantai dinding (aladin). "Gerakan semacam itulah yang akan digerakkan oleh PIM," jelas mantan ketua PP Muhammadiyah.



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Gedung DPR

Akom juga merencanakan, pada Bulan Puasa nanti dia akan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada di beberapa daerah, dia akan menjadikan perpustakaan lebih layak, agar semua fasilitas literasi untuk anak negeri semakin maju.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pengurus Dewan Nasional PIM sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Akom. Mereka memberikan bunga anggrek terbaik untuk Ketua DPR ini, sebagai tanda selamat milad untuknya. ■

(eko) foto:andi/hr

Fadli Zon Dorong Diplomasi Kebudayaan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong diplomasi kebudayaan yang efektif karena Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat elok, beragam dan indah. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Grup Sumbar Talenta di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

Kunjungan ini dimaksudkan juga untuk meminta dukungan DPR karena sebanyak 20 orang delegasi Indonesia akan mengikuti festival tong tong. Melalui festival itu dinilai baik karena mampu membawa Indonesia dalam kegiatan diplomasi internasional.

"Kita selalu mendukung upaya yang dilakukan oleh masyarakat bertalenta yang akan membawa misi kebudayaan ke Zimbabwe dan Belanda dalam festival tong tong ini," ujar Fadli.

Menurut Fadli, festival ini sangat baik karena membawa nama bangsa Indonesia dalam kegiatan diplomasi kebudayaan. Sehingga patut didukung.

Politisi Gerindra ini juga mendukung diplomasi kebudayaan sebagai bentuk upaya yang sangat bagus untuk dilakukan oleh Indonesia yang memiliki keindahan budaya.

"Kita bisa lebih mudah melakukan diplomasi kebudayaan dengan pendekatan seni budaya kita yang sangat elok, beragam dan indah. Kita juga memiliki anak remaja yang mempunyai talenta besar seperti penyanyi, koreotari dan lain-lain," ujar Fadli.

Fadli juga menjelaskan bahwa DPR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Grup Sumbar Talenta di Gedung DPR RI, Senayan

juga memiliki peran dalam diplomasi internasional, salah satunya melalui diplomasi parlemen. "Dalam berbagai kegiatan. Kita juga selalu mendukung diplomasi parlemen. Kita juga selalu menampilkan budaya Indonesia dalam berbagai *event* internasional yang diselenggarakan DPR," tuturnya.

Terkait dengan festival tong-tong, Fadli menjelaskan selain perhatian Zimbabwe terhadap Indonesia cukup besar,

kegiatan ini juga sangat menarik. "Jadi saya kira ini akan menjadi *event* yang menarik. Perhatian Zimbabwe pada Indonesia juga cukup bagus," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Fadli juga menyampaikan pesan pentingnya hari kebangkitan nasional (Harkitnas) ke 108 ini, menurutnya Harkitnas adalah momentum penting dalam sejarah Indonesia. Karena ini sebagai pergolakan kesadaran terhadap pendidikan dan pencerahan bangsa untuk mencapai

kemerdekaan.

"Hari kebangkitan nasional adalah hari yang sangat penting karena pada saat itu ada kebangkitan kesadaran terhadap pendidikan dan pencerahan bangsa menuju kemerdekaan. Ini diibaratkan sebagai bedug untuk kesadaran nasional dan membangkitkan organisasi-organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan," pungkasnya. ■

(hs.mp) foto: Jaka Nugraha/hr

Fadli Zon Dapat Dua Penghargaan dari Puri Agung Negara Jembrana

Dalam rangka memperingati hari lahir Puri Agung Negara Jembrana yang ke 186, Penglesir (Raja) Puri Agung Negara Jembrana, Anak Agung Gde Agung memberikan anugerah penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Puri Agung Negara Jembrana merupakan salah satu puri yang bersejarah di Bali. Ayah Penglesir Puri Agung Negara Jembrana adalah Anak Agung Bagus Sutedia, Gubernur Bali pertama.

Pemberian penghargaan kepada Fadli Zon dilakukan di Puri Agung Negara Jembrana, Sabtu (21/5) Pukul 20.00 WITA, dihadiri oleh para Panglesir Puri di sekitar Jembrana dan juga perwakilan dari Kesultanan Brunei

serta Malaysia.

Dalam sambutannya, Penglesir Puri Agung Negara Jembrana, Anak Agung Gde Agung menjelaskan bahwa Puri Agung Negara Jembrana sangat mengapresiasi sikap dan perhatian Fadli



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima penghargaan dalam rangka memperingati hari lahir Puri Agung Negara Jembrana yang ke 186 di Bali

Zon terhadap dunia seni dan budaya. Atas dasar inilah, Puri Agung Negara Jembrana memberikan dua penghargaan kepada Pimpinan DPR Korpolkam ini.

Penghargaan pertama yaitu The Puri Agung Negara Jembrana Outstanding Personality Award

Year 2016 dan kedua The Puri Agung Negara Jembrana Swadharmaning Bhakti Royal Family Award Year 2016.

Dalam sambutannya, Fadli Zon mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh Puri Agung Negara Jembrana.

"Penghargaan ini saya jadikan sebagai semangat untuk terus mengembangkan dan mendukung berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kekuatan kita sebagai bangsa, salah satunya terletak pada kesenian dan kebudayaan yang kita punya," jelas Fadli Zon menambahkan. ■

(um.dmp), foto: harandis/hr

Pemerintah Sampaikan KEM-PPKF 2017

Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2017 telah disampaikan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR. Rencana kerja pemerintah 2017 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan beragendakan penyampaian keterangan pemerintah atas KEM-PPKF yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Fokus pembangunan infrastruktur dan ekonomi kali ini ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan antarwilayah.

Seperti diketahui, pembahasan KEM-PPKF ini untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan laporan nota keuangan serta RAPBN tahun 2017. Selanjutnya, kata Taufik, keterangan pemerintah ini akan segera dibahas oleh semua fraksi di DPR RI. Pemerintah sendiri seperti disampaikan Menkeu berharap ada masukan dari DPR untuk menyempurnakan semua yang disampaikan pemerintah pada Rapat Paripurna tersebut.

Di hadapan para anggota DPR,

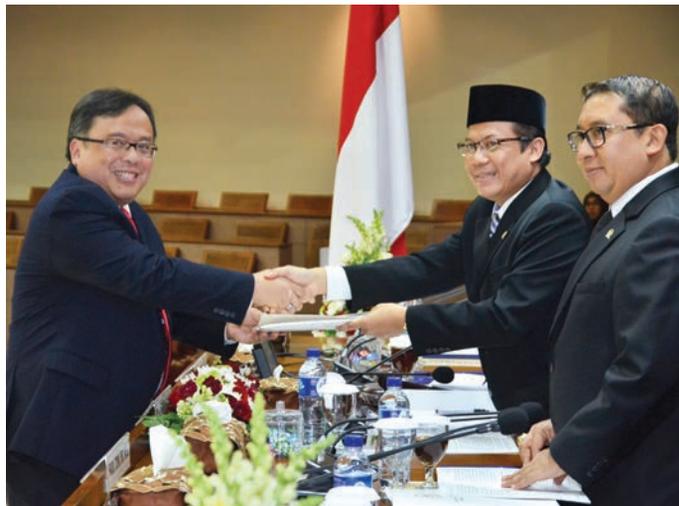
Menkeu mengatakan, pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2016 cukup menggembirakan, mencapai 4,9 persen. Ini didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi

diperkirakan mencapai kisaran 5,3-5,9 persen, inflasi bergerak di kisaran $4,0 \pm 1,0$ persen, dan nilai tukar rupiah sekitar Rp13.650-13.900 per dolar AS. Sementara itu, lifting minyak dan gas bumi 2017 diperkirakan mencapai 1.790-1.910 ribu barel per hari yang terdiri dari lifting minyak bumi 740-760 ribu barel per hari dan gas bumi 1.050-1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Di bidang perpajakan, seperti disampaikan Menkeu, pemerintah berusaha meningkatkan kinerja perpajakan. Untuk mendukung target pendapatan negara, pemerintah terus melakukan optimalisasi perpajakan. Di sisi lain, pemerintah berusaha agar pajak tidak menimbulkan disinsentif bagi keberlangsungan iklim investasi dan dunia usaha.

"Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak tahun 2017 sebagai sumber dana pembangunan, meskipun tantangannya diperkirakan akan sangat berat," kata Menkeu. ■

(um) foto: kreano/hr



Pimpinan DPR RI menerima draf KEM-PPKF dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

pemerintah yang stabil. Meski begitu, Menkeu memperkirakan perekonomian global 2017 akan lebih baik dibanding 2016. Selanjutnya, Menkeu mengutarakan asumsi dasar ekonomi makro 2017.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017

Ketua DPR Beri Penghargaan Pada Polisi Jujur

Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan penghargaan kepada Bripta Seladi, di Ruang Pimpinan DPR, Senin (23/5). Menurutnya, ini merupakan wujud apresiasi DPR kepada Aparat Polisi yang komitmen dengan kewajibannya seraya mengutamakan kejujuran dalam sepanjang tugas menjadi aparat penegak hukum.

Bripta Seladi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polres Malang Kota, menjadi salah satu potret nyata polisi teladan yang lebih memilih menjadi pemulung dari pada menerima suap saat bertugas. Bagi profesi penegak hukum kejujuran adalah syarat paling utama yang harus dimilikinya.

Namun menurut Akom, begitu Ketua DPR biasa disapa, sifat ini masih langka ditemukannya. Merefleksikan kondisi tersebut Akom mengutip pernyataan Presiden RI Ke 4, "Di Indonesia ini hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng," kelakur Akom disambut tawa awak media yang meliput.

Menurut dia, kejujuran Bripta Seladi adalah pelajaran yang memberikan nilai-nilai inspiratif, tidak hanya bagi aparat penegak hukum, tapi juga kepada seluruh profesi. "Mengajarkan kepada kita nilai-nilai kejujuran dan kerja keras dalam profesinya sebagai polisi," ungkap dia.

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya ini beranggapan, jika sifat jujur dan lurus hati ada pada seluruh aparat penegak hukum di Indonesia maka revolusi mental bisa terselenggara dengan baik.

"Kisah yang mengajarkan kepada kita semua untuk memilih mengutamakan kejujuran. Dengan ini revolusi mental akan berhasil. Menjunjung nilai-nilai kejujuran untuk mensukseskan revolusi mental," papar Akom.

Bripta Seladi yang memilih menjadi pengumpul sampah untuk menutupi kekurangan pendapatan dari gaji profesinya sebagai polisi bukanlah pekerjaan yang hina. Menurut Seladi, hal ini dia lakukan semata-mata untuk menafkahi keluarga. "Saya terjepit masalah biaya anak istri saya," ungkapnya.

Selain bisa mendapatkan uang halal dari pekerjaan sampingannya tersebut, pria berusia 57 tahun ini juga membantu dalam

menciptakan kebersihan lingkungan. Menurut pengakuannya awal dari memungut sampah daur ulang, dia bisa menjualnya sebesar 400 ribu rupiah.

Bripta Saladi memiliki sebuah

gudang sampah yang didapat dari pinjaman seseorang. Gudang itu ada di Jalan Dr Wahidin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Gudang tersebut tidak terlalu jauh, masih berada di jalan yang sama dengan kantor tempat ia berdinasi.

Ketika berdinasi menjadi polisi, ia bertugas di Urusan SIM Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Malang Kota yang berada di Jalan Dr Wahidin. Seladi mengatakan selama dia bertugas menjadi polisi kejujuran selalu dia pegang teguh.

Semua upaya suap untuk melanggar prosedur selalu dia tolak. "Saya, 16 tahun belum pernah menerima suap, baik makanan dan sebagainya," ujar Seladi.

Anggota Komisi III, TB Soenmandjaja yang hadir dalam pemberian penghargaan



Ketua DPR RI Ade Komarudin memberikan penghargaan kepada Bripta Seladi, di Ruang Pimpinan DPR

tersebut mengatakan, yang dilakukan oleh Bripta Seladi membanggakan. Dia mengakui, memang dalam pengupahan polisi berpangkat rendah masih belum memenuhi kebutuhan hidup standar.

Sehingga dia menyarankan, agar ke depan bisa ada inovasi supaya segala kebutuhan polisi yang tidak bisa dipenuhi oleh gaji pokoknya bisa dicukupi. "Memang dalam penggajian belum memenuhi kehidupan yang standar," ungkap politisi PKS ini menambahkan. ■

(eko,mp) foto:rumi/hr

Komisi VIII Alokasikan Tujuh Ribu Calon Haji Lansia Diberangkatkan



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain

Panja Konektivitas Transportasi Laut Terima Masukan Pakar

Panitia Kerja (Panja) Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan pakar guna mendapatkan masukan terkait transportasi laut.

Menurut Capt. Asnar Sitompul selaku praktisi transportasi laut yang sudah berkompeten memberikan masukan salah satunya dari segi keamanan dilaut yang merupakan titik awal dari pembangunan tol laut.

"Bukan langsung membangun beberapa pelabuhan dan fasilitasnya serta membangun banyak Kapal berbagai type, tetapi itu setelah Tol Laut nya lebih dahulu tertata rapi atau

dilakukan bersamaan," kata Asna Sitompul. Disini Asnar pun menerangkan beberapa masalah yang perlu ia informasikan selama dirinya bertugas dilaut kepada Panja.

"Saat ini yang belum diinformasikan kepada masyarakat adalah penataan ulang atau evaluasi alur-alur laut pelayaran yang menjadi tol laut yang akan dilalui oleh kapal-kapal yang akan dibangun itu dimana akan menambah jumlah lalu lintas laut," ujarnya.

Untuk angkutan laut, jelasnya, harus dievaluasi kondisi alur-alur pelayaran kita dari Barat hingga Timur atau Utara ke Selatan, "Karena itulah yang dimaksud poros maritim tersebut," terang Asnar.

Untuk mengawasi dan mengatur ini, pungkas Asnar, harus ada SDM yang bterampil dengan peralatan yang canggih pula yang disebut stasiun radar pengamat dan pusat informasi untuk kapal-kapal atau disebut *Vessel Traffic*

Information System (VTIS).

"Sejak lima tahun terakhir ini, sudah dibangun beberapa di perairan dan diselat selat, yang dimulai diselat Malaka, Selat Durian, Selat Bangka hingga laut Jawa, bahkan Pelindo II di Tpk sudah ada tetapi belum maksimal pelayanannya, dan sampai dimana berfungsinya," tandas Asnar

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena dalam sambutannya mengingatkan bahwa pembentukan Panja Konektivitas Tol Laut Komisi V DPR yang dibentuk pada Mei 2015 lalu, dimaksudkan untuk merespon program pemerintah yang terkait dengan konektivitas transportasi laut di Indonesia, menggali akar permasalahan dan kelemahannya serta menganalisis strategi.

Seperti diketahui, untuk mendorong dan mengembangkan infrastruktur konektivitas transportasi laut ini, pemerintah berencana membangun 24 pelabuhan *feeder* dan 170 pelabuhan *sub feeder*. Ke-24 pelabuhan *feeder* ini akan dibiayai oleh BUMN, yaitu PT Pelindo. Sementara pembangunan 170 pelabuhan *sub feeder* akan dibiayai APBN.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun 100 kapal perintis barang/ penumpang sampai dengan tahun 2019. Dan untuk tahun 2015 dititikberatkan pada pembangunan 25 unit kapal perintis ukuran 2000 *Gross Tonnage (GT)*. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk subsidi rute. ■



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena

(nt) foto: andy/hr

Komisi VIII DPR RI mendesak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jambi agar mengutamakan calon jamaah haji lansia untuk bisa segera diberangkatkan. Komisi VIII telah mengalokasikan tujuh ribu jamaah lansia secara nasional.

Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain menegaskan hal tersebut saat memimpin Tim kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi, baru-baru ini.

Malik mengungkapkan, berdasarkan laporan Kakanwil Kemenag Jambi, dari 2.081 orang calon jamaah yang berangkat tahun ini, ada tujuh orang yang batal berangkat karena sakit. Kemudian masih ada tiga orang lagi yang menunda keberangkatan. Berarti ada 10 orang yang

tidak berangkat. Jadi, calon jamaah haji dari Jambi berjumlah 1.229 orang.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VIII Choirul Muna, berharap, calon jamaah haji yang berangkat berusia di bawah enam puluh tahun. Dan ternyata, dari tujuh puluh kuota lansia, tidak semuanya terisi dengan alasan meninggal, tidak bisa melunasi biaya haji, sakit, dan sampai *injury time* tidak bisa berangkat.

Sementara Malik kembali berharap,

Kakanwil Kemenag Jambi bisa memperkirakan kapan jamaah haji asal Jambi tak lagi ada lansianya. Kakanwil Kemenag Jambi sendiri sudah berencana menurunkan usia jamaah haji lansia dari 75 tahun menjadi 70 tahun. Bahkan, bila perlu hanya usia 65 tahun. Seperti diketahui, semakin tua usia jamaah, semakin sulit mengaturnya. "Yang penting ada alokasi untuk lansia secara nasional. Itu yang kita maksimalkan," kata Malik. ■

(rief,mp) foto: arief/hr

Tahun 2016 Kinerja Individu Karyawan Setjen DPR Jadi Perhatian Penilaian

Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany melakukan rapat koordinasi dengan Inspektur Utama, Badan Keahlian Dewan, dan para Deputy serta Kepala Biro dilingkungan Setjen, dengan pokok pembahasan tentang Sosialisasi Pembangunan Agen Perubahan.

“Kita setiap hari Rabu pagi mengadakan rapat untuk evaluasi sekaligus proses monitoring terhadap tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan yang menjadi tujuan sasaran dalam reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih, efektif dan efisien, serta berintegritas,” ujar Winantuningtyas Titi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Menurutnya, untuk mencapai hal tersebut Setjen melakukan perubahan-perubahan dalam delapan area, antara lain perubahan mental dan perilaku, perubahan budaya dan pola kerja, serta dari sektor pengawasan juga diperkuat, hingga masalah pelayanan publik yang penting untuk ditingkatkan.

“Untuk melaksanakan itu kita punya rencana aksi yang terprogram. Oleh karenanya harus ada orang-orang tertentu baik yang terdiri dari pejabat eselon satu maupun eselon dua, dan ada beberapa pejabat eselon tiga, baik individu maupun kelompok yang berperan sebagai agen perubahan,” terang Win, sapaan akrab Winantuningtyas Titi.

Ditegaskan, sebelum reformasi birokrasi begitu ketat dilaksanakan, pegawai malas atau rajin, pegawai yang pintar dan semangat dengan pegawai yang tidak disiplin memiliki kesamaan tunjangan dan penghasilan. Namun dengan reformasi birokrasi tunjangan yang akan diberikan benar-benar berdasarkan beban kerja dan hasil kinerja pegawai tersebut.

“Tahun 2015 kemarin ukurannya baru kedisiplinan, dan kedisiplinan ukurannya baru masalah absen. Padahal ada juga



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

masukannya bahwa ada pegawai yang datang tepat waktu tetapi kemudian menghilang pergi mengerjakan sesuatu yang tidak jelas tujuannya, lalu tiba-tiba pada sore hari kembali datang untuk absen lagi, seolah-olah dia bekerja tepat waktu. Oleh karena itu pada tahun 2016 ini memang sudah betul-betul kinerja individu yang menjadi perhatian penilaian, hari ini dia

menghasilkan dan mengerjakan apa. Memang absensi menjadi dasar, tetapi outputnya menjadi terukur,” tegas Win.

Terkait agen perubahan, maka individu yang bersangkutan harus bersikap sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai dasar kinerja yakni Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas (RAPI). Sikap dan perilaku kerjanya harus mencerminkan nilai-nilai dasar kinerja tersebut. Dan bagaimana agen perubahan itu dapat memotivasi dan menjadi teladan serta panutan.

“Ada seleksi dari masing-masing atasan langsung untuk mencalonkan, sesuai dengan kriteria baik tentang kedisiplinan, semangat kerja, dan beberapa karakteristik khusus yang diperlukan, seperti memiliki jiwa kepemimpinan, religius, dan yang paling penting adalah berkomitmen dan melaksanakan sasaran target reformasi birokrasi, setidaknya dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan,” jelasnya. ■

(dep.mpr) fotokresno/hr

Pansus DPR Gelar Seminar RUU Pemberantasan Terorisme

Ketua Panitia Khusus (Pansus) tentang Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i membuka Seminar Nasional "Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia"

“Ini merupakan proses awal dalam rangka melahirkan revisi undang-undang terorisme. Seminar ini diselenggarakan untuk menerima masukan dari pakar, masyarakat serta stakeholder terkait RUU ini,” jelas Syafi'i saat membuka Seminar di Gedung DPR, Senayan, Rabu (25/5).

Dalam seminar tersebut, dibahas beberapa isu krusial, seperti definisi konkret tindak pidana terorisme, bagaimana keterlibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme, konsep deradikalisasi, serta bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Di Indonesia, perkembangan dalam

Komisi IV Dorong Pembentukan Badan Pangan Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan sesuai dengan amanah UU tentang Pangan.

Hal ini terkait dengan masih carut marutnya pengelolaan manajemen pangan di Indonesia baik di level distribusi dan kontrol terhadap harga pasar.

"Kelembagaan pangan sudah seharusnya segera dibentuk sesuai dengan mandat UU Pangan. Hal ini sangat penting karena sampai saat ini ketiga lembaga pemerintah, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog sendiri belum berkoordinasi dengan baik dalam mengambil keputusan impor pangan, meski UU Pangan secara tegas memperketat kebijakan impor pangan," tegas Daniel sebelum rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (20/5).

Menurutnya, keberadaan Badan Pangan sangat dibutuhkan tidak saja sebagai lembaga yang melakukan koordinasi, tetapi lebih dari itu Badan Pangan dituntut harus mampu memiliki akurasi data dan menjadi lembaga yang mempunyai akses penuh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan stok, distribusi dan stabilitas harga.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

"Pemerintah belum mempunyai tata kelola kelembagaan pangan yang mampu menjadi lembaga yang memiliki akses penuh terhadap stok, distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan. Pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan solusi tepat untuk mengatasi persoalan itu. Selain itu pemerintah juga harus memiliki data akurat yang dapat menjadi dasar penunjang dalam

pengambilan sikap dan keputusan terkait masalah pangan nasional," jelas politisi F-PKB dapil Kalimantan Barat tersebut.

Daniel juga mengatakan bahwa kedaulatan pangan nasional juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, dan infrastruktur pertanian yang rusak. Perkembangan kuantitas penduduk Indonesia membawa dampak pada perubahan kebutuhan dan produksi pangan nasional. Kebutuhan pangan akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

"Kebutuhan lahan untuk aktivitas non-pertanian terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Akibatnya, terjadi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kondisi ini tentu bisa mengancam kemampuan produksi pangan nasional, tetapi masalahnya bukan terletak pada ketiadaan perangkat hukum yang melindungi lahan sawah, melainkan lebih pada komitmen, keseriusan, dan kemampuan aparat negara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada," tandasnya. ■

(dep.mp) Foto: Kresno/hr



Suasana Seminar Nasional "Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia".

kebijakan pemberantasan dan penanggulangan terorisme mengalami percepatan pasca-peristiwa bom Bali, Oktober 2012 silam. Sesaat setelah peristiwa tersebut, pemerintah

mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003. Namun, UU yang berlaku saat ini bersifat reaktif sehingga UU tersebut hanya berlaku apabila terjadi tindak pidana terorisme.

Sebelumnya pemerintah mengungkapkan bahwa pelaksanaan UU tersebut sudah berjalan cukup baik, tetapi karena perkembangan ekstrimisme, radikalisme dunia sehingga menuntut dilakukannya perubahan atau

revisi undang-undang tersebut. Disisi lain, DPR pun menyetujui usulan pemerintah tersebut dengan membentuk pansus.

"Meskipun Pansus ini dibatasi oleh waktu, kita hanya diberikan 4 masa sidang namun kita tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa dan juga tidak boleh terlalu lama," papar politisi Gerindra itu.

Hadir dalam seminar tersebut pakar politik dan militer Salim Said, pengamat Intelegen dan Militer Ridwan Habib, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ■

(ann.mp) foto: jayadi/hr

Komisi VIII Apresiasi Program Pendataan Kemiskinan SIMANIS

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengapresiasi program berbasis website buatan Pemerintah Kota Tarakan, yakni, Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (SIMANIS) dalam memverifikasi dan validasi pendataan masyarakat miskin didaerahnya.

“ Kami menghargai program SIMANIS itu, yang penting ada dua indikator validasi data yang menjadi acuannya. Pertama harus mengikuti peraturan pendataan yang berlaku secara nasional dan kedua, data tersebut bisa dikembangkan menjadi indikator kemiskinan lokal”, kata Sodik saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR dengan Pemkot setempat di Kantor Dinsos Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (23/5).

Ia menambahkan, mengenai pendataan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional. Selama ini, masih belum sinkronnya data Kementerian Sosial dengan data BPS, kemudian yang lebih menghebohkan lagi adanya komplain langsung dari masyarakat, mereka menemukan di lapangan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, lanjut Sodik, karena masalah pendataan kemiskinan disadari juga oleh Kementerian Sosial, maka, tahun 2015 DPR telah menyetujui anggaran

kurang lebih 450-600 M untuk mengupdate data kemiskinan melalui program verifikasi dan validasi dengan jangka waktu 3 tahun.

“Nanti kita lihat hasil *update* pendataan kemiskinan dari Kemensos, *point* yang paling penting adanya kesadaran mengenai validasi data tersebut” tekan Politisi F-Gerindra itu.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII Wenny Haryanto, program SIMANIS berbasis web sesuai namanya manis, lebih tepat sasaran dan ekonomis. Namun, sayangnya *provider* internet di Kota Tarakan koneksinya kurang bagus.

Sementara itu, Sekda Walkot Khairul mengatakan, Program SIMANIS ini lebih pada melakukan verifikasi data, karena data dari pusat seringkali tidak tepat sasaran. Menurutnya, orang miskin mestinya mendapat bantuan sepenuhnya, tidak secara parsial.

“Kita saat ini sedang mencoba memberikan bantuan secara keseluruhan kepada orang miskin, seharusnya tidak



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid

ada orang miskin yang hanya mendapat fasilitas kesehatan, atau cuma bantuan beras raskin saja. Orang miskin ini harus dibantu penuh oleh pemerintah karena menjadi tanggung jawab kita bersama”, terangnya.

Selain itu, program SIMANIS dibuat karena banyak orang miskin yang datang ke pemkot tidak punya kerjaan, terlantar, mau tidak mau pemkot bantu. “ Untuk itu, supaya punya legalitas hukum, maka kami membentuk tim yang disahkan oleh pemkot,” ia menambahkan. ■

(ik, mp), foto: jaksa/hr

Anggota DPR Muslim Terima 122 Kepala Desa Bireun, Aceh

Anggota Komisi X DPR, Muslim menerima kunjungan kepala desa (Keuchik) Kabupaten Bireun, Aceh, di ruang operasional, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

Kehadiran 112 kepala desa ini untuk silaturahmi sebelum melaksanakan pelatihan tata kelola keuangan di Bogor.

“Para kepala desa ini akan melakukan pelatihan tatakelola

keuangan di Bogor, karena kebetulan lokasinya dekat dengan gedung DPR, mereka datang ke sini untuk silaturahmi,” ujar Muslim usai pertemuan.



Suasana pertemuan Anggota Komisi X DPR Muslim dengan sejumlah Kepala desa Kabupaten Bireun, Aceh

Isu PNPB Jadi Tema Workshop Pusat Kajian Anggaran DPR

Pusat Kajian Anggaran menggelar *workshop* bertema 'Menggali Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak', di Ruang Rapat Pansus, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/05).

Tema ini dianggap menarik karena PNBPN dapat menjadi alternatif penerimaan negara selain dari sektor perpajakan.

Hadir sebagai pembicara dalam *workshop* ini, yakni Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies; Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan; dan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan RI.

"Belanja negara terus meningkat, sehingga harus diimbangi dengan penerimaan yang meningkat pula. Selama ini kita ketahui bahwa penerimaan negara didominasi oleh perpajakan. Kita harus mencari alternatif penerimaan selain dari perpajakan, yakni ke PNBPN," kata Kepala Pusat Kajian Anggaran, Asep Ahmad Saefulloh, di sela-sela acara.

Asep mengakui, kinerja perpajakan terus meningkat, sehingga porsi terhadap penerimaan negara juga meningkat. Namun ternyata, target perpajakan tidak pernah tercapai. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, target pajak tidak pernah

tercapai. Di satu sisi, PNPB selalu melebihi target.

"PNBP selalu melebihi di atas target. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah ingin mencari gampangnya saja. Berbeda dengan pajak, selalu di bawah target. Ini ada apa dengan pengelolaan PNBPN," imbuhnya.

Asep berharap, dari *workshop* ini, peserta mendapat gambaran tentang tata kelola PNBPN yang lebih baik, terutama Pusat Kajian Anggaran yang merupakan bagian dari *supporting system* bagi Anggota Dewan.

"Tentunya hasil kajian ini akan disampaikan kepada Anggota Dewan, untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dari sisi fungsi anggaran DPR," kata Asep yang mengatakan bahwa peserta dari internal Badan Keahlian Dewan, Tenaga Ahli baik Alat Kelengkapan Dewan, hingga TA Anggota Dewan.

Dalam sesi diskusi, Marwan Batubara menjelaskan ada beberapa hal yang menyebabkan PNBPN tidak optimal, diantaranya karena penyimpangan terhadap



Kepala Pusat Kajian Anggaran, Asep Ahmad Saefulloh

konstitusi, eksploitasi sumber daya alam minerba secara eksekif dan tanpa kendali, hingga aspek kepentingan politik yang justru lebih dominan dalam kebijakan.

"Besarnya PNBPN itu fluktuatif karena harga migas dan minerba itu naik turun. Yang masuk dalam APBN itu tidak seharusnya, misalnya karena diselundupkan yang terus berlangsung. Sehingga PNBPN tidak optimal," jelas Marwan.

Sementara itu Ah Maftuchan menilai UU PNBPN sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan peraturan perundangan lainnya. ■

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Demokrat ini mengatakan silaturahmi ini baik agar mereka tahu betul apa yang dikerjakan oleh wakil rakyatnya, sehingga tidak ada pikiran bahwa anggota DPR hanya 3D (duduk, diam, duit), bahwa DPR hanya super sibuk.

"Kebetulan saya hari ini ada 6 agenda, makanya saya mohon maaf karena tidak dapat mendampingi mereka, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan yang terbaik di DPR, dan kita harapkan semua bisa menikmati," katanya.

Menurut anggota Komisi X DPR ini, mereka ingin melihat seluruh fasilitas yang ada di gedung parlemen, ingin meninjau langsung ruang paripurna, sekalian berfoto-foto. Karena itu kata Muslim, tidak

membicarakan politik, biarlah menikmati seluruh fasilitas yang ada di gedung parlemen ini, sehingga mereka bisa bercerita kepada masyarakat.

Politisi Dapil Aceh ini mengucapkan terimakasih kepada Setjen yang telah menerima kepala desa Kabupaten Bireuen dengan begitu mulia. Ini bisa menjadi contoh bahwa DPR terbuka untuk masyarakat yang ingin ke gedung rakyat ini, dalam rangka membangun komunikasi.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Suratna mengatakan, Bagian Humas DPR selalu membuka diri untuk kunjungan seperti ini, sekaligus melihat bagaimana anggota DPR memperjuangkan aspirasi masyarakat di gedung parlemen dimana

seluruh kebijakan negara diputuskan disini.

Salah satu kepala desa, Hasan mengucapkan terimakasih atas sambutan yang diberikan oleh Setjen dan anggota dewan yang terhormat.

"Hari ini kami sangat menikmati, artinya Humas Setjen DPR disini benar-benar menerima rakyat dengan sangat baik dan santun. Kami diberikan pelayanan yang sangat memuaskan. Saya kira hal ini menjadi catatan bagi kami bahwa anggota DPR setelah kita melihat langsung ternyata memang sangat sibuk dan kami tidak menyangka bahwa kegiatan DPR sangat padat," tuturnya. ■

(sf) Foto: Kresno/hr

(rmm/imp) Foto: jakar/hr

PKH dan KUBE Bantu Masyarakat, Tapi Belum Siap Dihentikan

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR mengunjungi warga binaan Kemensos yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Jika melihat target dan sasaran dari program tersebut sudah tepat sekali. Pasalnya, sewaktu Tim Komisi VIII memantau warga binaan Kemensos, selain tempat tinggal mereka yang kurang layak, pendapatan mereka juga tergolong rendah.

"Saya bertanya kepada warga penerima bantuan mengenai dampak dari bantuan PKH dan KUBE bagi perekonomian mereka, dan kapan siap dihentikan. Rata-rata mereka menjawab sangat terbantu, namun belum ada yang siap jika dihentikan. Jangan sampai dana triliunan itu hanya memelihara kemiskinan, karena tujuan utama bantuan ini dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan," ujar Sodik Mudjahid saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII meninjau lokasi warga binaan penerima PKH dan KUBE di Kota Tarakan, Kaltara, Senin (23/5).

"Kami terus terang belum puas dari sisi dampak bantuan-bantuan tersebut (PKH, KUBE), kalau penyalurannya mungkin sudah bagus, tapi dampak untuk penanggulangan kemiskinan belum dirasakan betul oleh penerima bantuan, karena ada juga yang sudah tahunan



Tim Kunspek Komisi VIII DPR mengunjungi warga binaan Kemensos yang mendapatkan bantuan PKH

mendapatkan bantuan belum bisa mandiri", tekan politisi Dapil Jawa Barat I itu.

Menurut Sodik, jika melihat laporan dari Kementerian Sosial, jangan selalu menekankan pada angka-angka saja, tetapi evaluasi mengenai dampaknya tidak ada. Kedepan harus ada evaluasi secara menyeluruh, terutama dampak dari bantuan tersebut.

Sementara itu, menurut Anggota Komisi VIII Wenny Haryanto, program penanggulangan kemiskinan PKH, KUBE dan RUTILAHU secara penerapannya dimana-mana menjadi program tepat sasaran yang ditunggu-tunggu dan digemari oleh masyarakat.

"Namun, saya melihat ada sedikit kendala pada programnya, yakni, kurang

ada petunjuk yang jelas mengenai programnya. Alangkah baiknya jika dibuatkan semacam brosur atau buku petunjuk, sehingga para calon warga yang akan menerima bantuan tidak bingung. Faktanya di lapangan, baik yang menjelaskan program dan peserta yang mengikuti sama-sama bingungnya," ujar Politisi F-Golkar itu.

Divisi Program Bantuan Kemensos, Ni Masjitoh Tri Siswandewi mengatakan, pada tahun 2016, ada penambahan sekitar 2,5 juta PKH untuk 34 provinsi, sehingga di 2016 seluruh kabupaten mendapatkan PKH. Untuk penyaluran bantuan PKH di Kota Tarakan pada tahun 2016 mencapai 1.265 keluarga, jika di total dana program PKH yang telah dikeluarkan se-provinsi Kaltara kurang lebih sebesar 3 milyar.

Untuk kepesertaan PKH, kata Masjitoh, kami sudah bersurat kepada Dinsos Provinsi atau Kabupaten seluruh Indonesia untuk menyampaikan usulan kepesertaan PKH tambahan 2,5 juta tadi, data yang diusulkan mengacu dari hasil verifikasi 2015, kemudian dikoordinasikan oleh pemkot atau kabupaten yang telah di stempel supaya ada legalitasi, data tersebut akan dicocokkan dengan data Basis Data Terpadu (BDT), hasilnya akan menjadi satu data. ■

(ik-mp), foto: jika nugarah/hr.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid

DPR Usulkan Perubahan Kurikulum Manasik Haji

Tim Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Sodik Mudjahid didampingi 12 anggota melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ini dalam rangka menghimpun masukan berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Haji 2018.

Kunjungan ini dalam rangka menghimpun masukan berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Haji 2018.

Dalam kaitan ini Komisi VIII mengusulkan perubahan kurikulum manasik haji untuk penyelenggaraan haji

2018 dengan lebih menekankan pada aspek teknis di lapangan selama melakukan ibadah tersebut.

"Selama ini kami menilai pelatihan manasik haji hanya terfokus pada pelatihan do'a-do'a pada saat menjalankan ibadah haji saja. Padahal ada aspek penting lain

yang harus dikuasai calon jamaah haji di lapangan," kata Sodik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), belum lama ini.

Menurut Sodik, selain memberikan bimbingan aspek ritual ibadah melalui manasik haji, pemerintah masih memiliki kewajiban memberikan pengetahuan mengenai area dilaksanakannya ibadah haji. Selain itu pelatihan kesiapan mental serta akhlak calon jamaah.

Informasi mengenai tempat dilaksanakannya ibadah haji, misalnya dapat disajikan secara mendetail melalui pemutaran film yang menggambarkan kondisi Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Madinah. Penyempurnaan pelatihan manasik haji memang harus terus dilakukan, apalagi fasilitas yang ada sekarang lebih memadai.

Lebih lanjut Sodik mengatakan, bahwa

dalam kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat mencakup 30 persen pelatihan ritual ibadah, 30 persen informasi medan, serta 40 persen kesiapan mental dan akhlak. "Kalau sekarang 90 persen hanya memuat ritual saja," ujarnya.

Usulan itu, sambung politisi Gerindra ini, telah disampaikan ke Kementerian Agama, namun pihak meminta penangguhan hingga dua tahun yang akan datang sebab buku-buku materi manasik haji untuk dua tahun ke depan telah terlanjur dicetak. "Kementerian Agama minta waktu dua tahun lagi," imbuh Sodik.

Sementara itu Politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq menambahkan kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat lebih menyoroti hal teknis yang paling mendetail seperti bagaimana menggunakan kunci kamar hotel, menggunakan lift, menggunakan

WC duduk, hingga penggunaan air di hotel.

"Banyak kejadian orang tua jamaah haji menjerit karena mengira air (kamar mandi) hotel panas semua karena tidak tahu cara penggunaannya. Itu juga harus diperhatikan," ujarnya.

Selain membenahan kurikulum manasik haji, menurut dia, Kementerian Agama juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring kepada Kepala Regu (KARU) dan Kepala Rombongan (KAROM) guna memastikan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan, pelayanan, serta perlindungan kepada jamaah haji.

"Dengan demikian jamaah haji Indonesia tidak tersesat dan tidak menjadi korban dari rapuhnya sistem dan ketidakpahaman antara Kepala regu dan Kepala Rombongan," kata Maman. ■

(hr), foto : hindra/hr

Komisi VIII Pantau Penyaluran Bansos Entas Kemiskinan di Riau

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik memantau Program Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, Selasa (24/5).

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain saat bertemu dengan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Kepala SKPD, Kepala Dinas Sosial Syarifuddin, Pendamping PKH, Pendamping KUBE serta Tenaga Kesejahteraan Kecamatan di Aula Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau.

Kedatangan Tim Kunker Komisi VIII DPR, lanjut Haramain, untuk melakukan komunikasi intensif dengan mitra kerja yang berada di daerah serta mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang kondisi yang terjadi untuk dijadikan evaluasi dengan kementerian terkait.

"Dalam pembukaan UUD 1945 negara bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal tersebut dilakukan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas

kebutuhan dasar sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional," jelas politisi PKB tersebut.

Terkait hal itu, upaya mensejahterakan fakir miskin telah diakomodir dalam UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang intinya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional.

"Komisi VIII DPR ingin mengetahui berapa alokasi anggaran Program Penyaluran Bansos untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau, bagaimana pola koordinasi lintas sektor serta kendala yang dihadapi, berapa jumlah penduduk miskin yang sudah tersentuh dan yang belum serta bagaimana peran masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain memberikan Bansos di Provinsi Riau

program tersebut," ujar Haramain mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Kadis Sosial Provinsi Riau, Syarifuddin mengemukakan besaran alokasi anggaran dinas sosial tahun 2016 sebesar Rp 37,694 miliar dengan total jumlah penduduk miskin mencapai 562.000 jiwa dan yang sudah tersentuh oleh program sosial sebanyak 270.503 jiwa.

"Kami mengakui keterbatasan anggaran cukup menyulitkan dalam merealisasikan berbagai program, mengingat banyaknya jumlah warga miskin yang perlu diantarkan," papar Syarifuddin.

Oleh karena itu pihaknya sangat mengharapkan anggaran di dinas sosial provinsi Riau tidak mengalami pemangkasan akibat dari defisit APBN yang saat ini sedang dibahas antara pemerintah dan DPR dalam RAPBN-P. ■

(Naeftuwoji) Foto : oji/hr

Banyak Faskes Terima Dana Kapitasi Tanpa Layani Pasien

Komisi IX DPR membahas mengenai banyaknya permasalahan dalam pelayanan kesehatan terutama yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (23/5).

Ketua Komisi IX, Dede Yusuf menjelaskan salah satu masalah yang dibahas adalah terkait dengan dana kapitasi yang diberikan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). Menurutnya, selama ini banyak faskes yang mendapat dana kapitasi tanpa melayani pasien.

"Tidak terlayani pasien dikarenakan tidak meratanya tenaga kesehatan, karena tidak adanya tenaga kerja faskes hanya merujuk saja sehingga terjadi penumpukan di rumah sakit, tetapi dana kapitasi tetap diberikan," ujarnya.

Karena itu, kata politisi Fraksi Partai



Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf

Demokrat ini, perlu *database* yang cukup akurat untuk mengelompokkan faskes yang tidak memenuhi standar, sebab hal ini akan membebankan JKN, dengan penumpukan pasien di Rumah Sakit.

Selain itu, Dede juga membahas

mengenai INACBGs yang perlu diperbaiki nilai-nilainya. "Makanya di panja kita meminta INACBGs dilakukan perbaikan. Dilihat berdasarkan *database* INACBGs selama dua tahun JKN berdiri, agar kelihatan dan dapat dihitung ulang sebenarnya berapa dana yang dibutuhkan untuk menyembuhkan satu jenis penyakit.

Sementara Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. I. Oetama Marsisi, Sp. OG menjelaskan, banyak pelaksanaan yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan kenyataan konsep JKN yang seharusnya. Contohnya, masalah besaran kapitasi yang disebabkan tingkat kesehatan di setiap daerah berbeda.

Belum lagi masalah obat-obatan dan sarana-prasarana, dokter disuruh menyelesaikan 80 persen masalah, tidak boleh merujuk tetapi perlengkapan sarana untuk menangani kasus itu tidak ada. Selanjutnya yang sangat bermasalah adalah terapan di rumah sakit mengenai INACBGs. IDI akan membuat buku putih mengenai masalah yang ditemukan dan juga solusi. ■

(ann.mp) foto: Jayadi/hr

PIA DPR Gelar Kebaktian Ibadah Rohani

Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR menggelar ibadah kebaktian rohani di kediaman Lina Nurdin Tampubolon.



PIA DPR gelar kebaktian di kediaman Lina Nurdin Tampubolon

Dijelaskan Wakil Ketua PIA Grace Fadli Zon, PIA selalu aktif melakukan berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan guna menjalin silaturahmi serta meningkatkan keakraban sesama anggota PIA. Salah satunya dengan melakukan ibadah pengajian untuk umat Muslim dan ibadah kebaktian rohani untuk kaum Nasrani.

"Hari ini merupakan kebaktian perdana yang PIA lakukan dan kita rencanakan akan dilaksanakan secara rutin seperti pengajian, yang kebetulan sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Tidak hanya fokus pada kegiatan sosial, tetapi keagamaan juga perlu mendapat tempat dalam kegiatan PIA," ungkap Grace

Fadli Zon sebelum kebaktian berlangsung di bilangan Polonia, Jakarta Timur, Baru-baru ini.

Masih dijelaskan Grace, program ini sudah dicanangkan dalam rapat program kegiatan PIA Januari lalu dan akan menjadi agenda rutinitas PIA setiap bulannya. Sementara itu, berkenaan dengan tempat berlangsungnya kebaktian kerohanian tersebut akan dilaksanakan secara bergiliran di rumah anggota PIA yang beragama Nasrani. Ia juga meminta kepada seluruh partai agar turut berkontribusi supaya kebersamaan PIA semakin meningkat.

Hal senada diungkapkan Lina Nurdin Tampubolon, yang pertama kali

mengkoordinir berlangsungnya kegiatan keagamaan ini, mengharapkan dengan adanya kegiatan tersebut mampu merangkul semua anggota PIA.

"Acara PIA itu sebenarnya asyik banget, kegiatannya juga macam-macam, ada seminar, ada bakti sosial, dan kali ini sifatnya keagamaan," tutur Lina.

Ibadah ini berlangsung secara khidmat yang kemudian ditutup dengan makan siang bersama. Kekompakan PIA sangat kental terlihat dengan dihadirinya anggota PIA yang tidak hanya kaum Nasrani tetapi juga dari anggota PIA yang berumat muslim. ■

(ann.mp) foto: ray/hr

Komisi X Dorong PSSI Selesaikan PR dari FIFA

Komisi X DPR RI mendorong Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk fokus menyelesaikan lima pekerjaan rumah dari Federation of International Football Association (FIFA), pasca pencabutan sanksi oleh federasi sepakbola internasional itu beberapa waktu lalu.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya (F-PD), usai rapat dengar pendapat umum dengan PSSI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5).

"Mayoritas rekan-rekan di Komisi X DPR bersyukur, pemerintah sudah kembali ke jalan yang benar. Kami mendorong PSSI segera berbenah dengan mencantumkan lima agenda prioritas dari FIFA," saran politisi asal dapil Aceh itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Moreno Soepranto mengingatkan, selain fokus pada pekerjaan rumah dari FIFA, politisi F-Gerindra itu juga berharap PSSI bisa fokus pada perolehan prestasi.

"Dengan lima catatan FIFA untuk PSSI, saya meminta direalisasikan kongkret. Lalu fokus pada prestasi dan merealisasikan Timnas.

Saya berharap, PSSI bisa menjaga keutuhan dunia olahraga, khususnya sepakbola," pesan politisi asal dapil Jawa Timur itu.

Sebagaimana diketahui, pasca pencabutan sanksi oleh FIFA, PSSI mendapat lima tugas yang harus segera diselesaikan, yakni memperbaiki hubungan dengan pemain, meninjau Indonesia Super League (ISL) sebagai kompetisi resmi PSSI, mempersiapkan Timnas untuk mengikuti beberapa agenda FIFA seperti Piala AFF, Sea Games 2017 dan Asian Games 2018.

Kemudian, memperbaiki statuta PSSI sesuai dengan standar FIFA dan pengembangan infrastruktur persepakbolaan nasional berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Rapat ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Komisi X DPR RI mengapresiasi terhadap keputusan FIFA yang telah mencabut sanksi terhadap PSSI. Kedua, Komisi X DPR RI mengapresiasi penjelasan PSSI tentang program kerja, pembenahan internal, dan langkah-langkah untuk memutar kompetisi sepakbola nasional pasca dicabutnya pembekuan atau sanksi oleh pemerintah dan FIFA.

Ketiga, Komisi X DPR RI mendukung langkah-langkah PSSI dalam menjalankan program prioritas persepakbolaan nasional sebagaimana tercantum dalam acuan kerja yang direkomendasikan oleh FIFA pada surat tertanggal 13 Mei 2016, diantaranya dengan memperbaiki hubungan dengan pemain,

memperbaiki statuta PSSI sesuai dengan standar statuta FIFA, meninjau Indonesia Super League (ISL) sebagai kompetisi resmi PSSI, sekaligus mengkaji statusnya Torabika Sepakbola Championship (TSC) dalam Kongres PSSI, 1 Juni 2016 mendatang.

Berikutnya, mempersiapkan Tim Nasional Indonesia FIFA untuk mengikuti beberapa agenda FIFA yang terdekat seperti Piala AFF 2016, Sea Games 2017 dan Asian Games 2018, dan pengembangan infrastruktur persepakbolaan nasional berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memajukan sepakbola nasional.

Kesimpulan keempat, agar sepakbola nasional bisa segera bangkit kembali dan mengharumkan nama bangsa, Komisi X DPR RI meminta PSSI untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sepakbola nasional termasuk dengan pemerintah dan klub-klub sepakbola nasional.

Kelima, Komisi X DPR RI akan menyampaikan kepada pemerintah agar kebijakan terhadap PSSI (pemberian sanksi) seperti SK Menpora 01307 tidak terulang kembali, mengingat dampak terhadap terhentinya aktifitas sepakbola menimbulkan kerugian pada pembinaan dan prestasi persepakbolaan nasional.

Keenam, Komisi X DPR RI akan menyampaikan aspirasi yang berkembang dalam RDPU dengan hari ini, termasuk adanya permintaan dukungan anggaran dalam pembinaan Tim Nasional dengan poin 2 d, pada rapat kerja dengan Menpora RI selanjutnya.

Ketujuh, dengan dicabutnya pembekuan atau sanksi oleh pemerintah dan FIFA, Komisi X DPR RI meminta PSSI ke depan bisa lebih profesional, akuntabel dan berprestasi. ■



Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya

Legislator Usulkan Bentuk Panja Utang

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengusulkan agar dibentuk panitia kerja (panja) utang untuk menghadapi dinamika utang Indonesia yang meningkat setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin, (23/5).

"Persoalan utang ini dari hari ke hari menjadi persoalan serius. Bagi negara berkembang yang belum beruntung, utang menjadi momok yang menakutkan. Terlebih hingga muncul istilah HIPC atau Heavily Indebted Poor Countries, yakni negara miskin yang utangnya besar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, utang luar negeri berjangka panjang pada akhir



Anggota Komisi XI DPR RI
Hendrawan Supratikno

triwulan I-2016 mencapai US\$ 277,9 miliar (87,9% dari total ULN), atau naik 7,9%. Lebih lambat dari pertumbuhan triwulan IV-2015 yang sebesar 9,2%

Di sisi lain, ULN berjangka pendek pada akhir triwulan I-2016 tercatat sebesar US\$ 38,1 miliar atau turun 8,4%, lebih lambat dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan triwulan IV-2015 yang sebesar 13,7%.

Selain itu, perkembangan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) pada akhir kuartal I-2016 tercatat sebesar 36,5 persen, sedikit meningkat dari 36,0 persen pada akhir kuartal IV-2015.

Menanggapi hal itu, Hendrawan menuturkan agar pemerintah menggunakan banyak indikator untuk melihat rasio utang. Mengingat, di sisi lain kemampuan ekspor Indonesia sepanjang 2016 mengalami penurunan hingga 6-10%.

Ia menegaskan bahwa perlu dibentuknya panja utang untuk menghadapi dinamika utang Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. "Karena persoalan utang ini adalah serius maka saya ingin usulkan untuk dibuat panja utang. Karena persoalan utang tidak bisa dibicarakan selama 1-2 jam," ujar anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Hendrawan menuturkan panja utang itu sangat berkaitan dengan masa depan bangsa. "Persoalan utang adalah hal yang sangat berat, karena ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa," tuturnya. ■

(hs.mp) foto: Naeufurji/hr

Perusahaan Langgar Aturan Harus Disanksi dan Dibina Secara Profesional

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN Sungkono menilai, perusahaan penerbangan Lion Air sekarang ini hampir memosisikan dan menguasai seluruh jaringan.

Kalau ini berkembang dan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kita akan mengalami banyak kesulitan.

"Umpama Lion Air mengalami kegagalan manajemen, tidak ada perusahaan yang mampu mengcover masalah itu, maka kita harus hati-hati mengambil keputusan terkait maskapai penerbangan tersebut," katanya saat berbincang di Gedung DPR, Rabu (25/5).

Harus diakui, lanjut politisi dari Dapil Jatim ini, masalah transportasi penerbangan kita masih jauh dari memuaskan sehingga dalam menyusun peraturan bagi masuknya investor perlu hati-hati. Di saat pemerintah berupaya menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri, jangan malah mereka menjadi penguasa.

Dari sisi armada, menurut Sungkono, Lion Air hampir mengalahkan Garuda. Karena itu, dia berharap Garuda juga melakukan pembenahan dalam pelayanan transportasi udara tersebut. Sebagai perusahaan pemerintah, Garuda harus siap melayani seluruh masyarakat termasuk penerbangan perintis yang sebelumnya ditangani Merpati.

Dengan banyaknya penerbangan perintis maka akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi termasuk memajukan daerah tujuan wisata yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa. Untuk itu pula, politisi PAN asal Sidoarjo ini mendesak dalam kasus Lion Air yang menurunkan penumpang asing di terminal domestik, jangan membuat isu negatif sebab masalahnya sensitif.



Anggota Komisi V DPR RI Sungkono

"Intinya kalau ada perusahaan melanggar harus diberi sanksi sesuai aturan yang ada. Beri sanksi namun jangan ditakut-takuti apalagi diberangus, berikan pembinaan yang profesional," ujarnya.

Satu lagi diingatkan, pemerintah jangan sepenuhnya melepas armada udara ke swasta. "Jangan sampai sekarang jadi harapan, besok jadi bencana. Negara punya kemampuan, swasta juga mendorong, sama-sama untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkask dia. ■

(mp) foto: andri/hr

Sekjen DPR Resmikan Ruang Belajar Pusdiklat BKD

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany meresmikan penggunaan ruang belajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Badan Keahlian DPR (BKD).

Dikemukakannya, peresmian penggunaan ruang belajar Pusdiklat ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan reformasi birokrasi Setjen DPR.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada teman semua yang sudah bersedia bahu-membahu merenovasi ruangan ini. Saya kira ini salah satu bukti bahwa pelaksanaan transformasi kelembagaan kita berjalan," ujar Win saat membuka peresmian ruang belajar Pusdiklat di Gedung Nusantara 1 Lantai 3, Senayan, Jakarta, Senin (23/05).

Win (sapaan akrab Sekjen) didampingi Irtama DPR Setyanta Nugraha, menjelaskan pentingnya Pusdiklat ini. Tidak hanya membangun *skill* dan kompetensi saja, tetapi juga untuk



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany meresmikan ruang belajar Pusdiklat dan Badan Keahlian DPR

membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. "Setiap pimpinan dalam setiap jenjang harus bisa menjadi teladan dan ini merupakan salah satu tanggung jawab dari Pusdiklat untuk membangun SDM yang memiliki nilai

integritas, loyalitas, dan mampu bekerja dengan ikhlas, bersih dan jujur," jelasnya.

Selain itu, Win juga menegaskan pentingnya mengutamakan motto atau nilai-nilai dasar kerja kesetiaan yakni Religius, Akuntabel, Professional dan Integritas (RAPI) sehingga tidak hanya menjadi slogan. Tidak saja komitmen untuk bergerak bersama tetapi bagaimana membangun institusi kelembagaan ke arah yang lebih baik.

La juga memaparkan, untuk menggapai salah satu sasaran reformasi birokrasi seperti tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya harus didukung penuh, tidak hanya melalui regulasi tetapi berbagai instrumen lainnya. "Fokus pada berbagai aturan secara teknis maupun fungsional juga tak kalah penting," paparnya. ■

(ann.mp) foto:mbn/hr

DPD Banyumas Konsultasi Sistem Kerja Bamus dan Banggar

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyas Titi Swasanany menerima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas.

Kedatangan anggota DPRD Banyumas kali ini untuk melakukan konsultasi mengenai sistem kerja Badan Musyawarah (Bamus) dan Badan Anggaran (Banggar).

Dalam pertemuan tersebut, Win sapaan akrab Sekjen DPR, memaparkan proses pembentukan Bamus sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2014 Tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

"Bamus yang merupakan alat kelengkapan Dewan bersifat tetap, dimana keanggotaannya dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan dan permulaan tahun sidang," paparnya saat menerima kunjungan DPRD Banyumas di Gedung Setjen DPR, Jumat (20/5).



Sekretariat Jenderal DPR Winantuningtyas Titi Swasanany menerima sejumlah anggota DPRD Kabupaten Banyumas

Selanjutnya, Win menjelaskan, anggota Bamus berjumlah paling banyak 1/10 dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Bamus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Selain itu, di kesempatan yang sama, wanita yang sudah menjabat Sekretariat Jenderal sejak tahun 2013 ini juga menjelaskan tentang tata cara dan pelaksanaan tugas Banggar. Disampaikannya, anggota Banggar bertugas membahas pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN bersama Pemerintah.

Selanjutnya, Banggar berhak membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah.

"Tidak hanya melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di Komisi atau AKD lainnya, tetapi juga membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan dengan APBN," tutur Win. ■

(ann.mp) foto: Naefturoy/hr

Maluku, Provinsi Risiko Bencana Tertinggi Kedua di Indonesia

Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Baznas melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Maluku berkaitan dengan permasalahan penanggulangan bencana.

Berdasarkan data bahwa Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan risiko bencana yang cukup tinggi, bahkan nomor dua tertinggi se-Indonesia. Risiko ini meliputi banjir, gunung meletus, longsor, dan tsunami.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi Maluku yang diwakili Sekda Maluku, Hamid Bin Thahir, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, Senin (23/5).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, bahwa tren bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun 2012-2016, baik intensitas, sebaran dan magnitude, seperti yang terjadi di Jawa Barat, Padang (Sumbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan berbagai daerah lainnya. "BNPB menyebutkan indeks kerentanan bencana periode 2013-2018 menempatkan Maluku dalam skor 187 atau masuk dalam kelas risiko tinggi nomor dua setelah Provinsi Sulawesi Barat," jelasnya.

Berkaitan dengan kondisi ini, lanjutnya, Komisi VIII memandang perlu dilakukan langkah-langkah strategis, perhatian serius dan tindakan nyata bersifat segera maupun preventif serta perlu meningkatkan mitigasi, guna menghilangkan atau mengurangi ancaman atau dampak ditimbulkan akibat bencana.

Selain itu juga perlu menyamakan



Tim Kunker Komisi VIII DPR RI saat meninjau daerah rawan bencana di Maluku

persepsi dari para pemangku kepentingan tentang berbagai kebijakan dan membangun sinkronisasi program penanggulangan, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Komisi VIII DPR RI dapat memahami kondisi BNPB saat ini yang masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan alokasi anggaran. Tetapi bagaimanapun juga, jelas Deding, di dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah diamanatkan bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

"Oleh karena itu, sesungguhnya kebijakan tersebut menjadi komitmen BNPB bersama-sama dengan Komisi VIII DPR RI dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, yang diawali oleh upaya

mitigasi sampai kepada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana," ungkap Deding.

Dia memperanyakan, sejauhmana langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemda bersama BPBD dalam upaya preventif, tindakan mitigasi bencana melalui pelatihan, pendidikan, penyiapan SDM maupun berbagai upaya membangun sinkronisasi program

penanggulangan, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Maluku.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Maluku, Hamid Bin Thahir mengatakan Pemda melalui BPBD baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota menggiatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami kondisi dan karakteristik wilayah dimana mereka tinggal dan apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi suatu bencana.

"Kesiapsiagaan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana," ungkap Hamid. Menurutnya, salah satu upaya mewujudkan bangsa yang tangguh dimulai dari bagaimana mewujudkan ketangguhan masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh maka salah satu program unggulan dari BNPB melalui program penguatan kelembagaan yang diberikan kepada BPBD kabupaten/kota adalah kegiatan desa tangguh bencana.

Kegiatan ini merupakan upaya menyiapkan masyarakat di desa untuk mengetahui bahaya di daerahnya melalui pemetaan daerah-daerah rawan bencana di desa tersebut. Selanjutnya, sambung Hamin, masyarakat memahami apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana di wilayahnya melalui sistem peringatan dini yang disepakati sesuai kearifan lokal setempat, petunjuk arah evakuasi, menyiapkan relawan untuk bertindak cepat saat keadaan darurat, serta membentuk forum desa tangguh bencana di desa tersebut.

Lebih jauh, Hamin menjelaskan,

bahwa Pemerintah Pusat melalui BNPB berupaya memberikan rangsangan kepada daerah melalui pengalokasian anggaran untuk kegiatan di daerah dan tentu dengan harapan, Pemda Kabupaten/Kota mendorong bertambahnya pembentukan Destana melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing sehingga percepatan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh yang ditargetkan di tahun 2019, indeks risiko bencana semakin berkurang akan dapat dicapai.

Ia menambahkan, bahwa Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota melalui BPBD Provinsi dan BPBD

Kabupaten/Kota juga mendapatkan bantuan peralatan dan logistik dari BNPB untuk kesiapsiagaan apabila terjadi keadaan darurat bencana. Sedangkan untuk tahap tanggap darurat, BNPB juga membantu daerah menyediakan dana tanggap darurat selain penggunaan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemda masing-masing, tutupnya.

Usai pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan dua paket logistik, masing-masing kepada Sekda Maluku Hamin Bin Thahir dan Kepala BPBD Maluku Farida Salampessy. ■

(tw) foto: iwan amanias/tw

Baleg Bahas RUU Jabatan Hakim

Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim. Salah satu hal yang mengemuka dalam pembahasan RUU tersebut ialah usulan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berstatus Pejabat Negara.

Apakah seluruh hakim di tingkat pertama hingga hakim agung menjadi pejabat negara atau mungkin juga ada nomenklatur lain misalnya aparaturnya yudisial.

"Teman-teman hakim kita belum mendapatkan kepastian atau landasan hukum apakah mereka menjadi pejabat negara atau bukan," jelas Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/05).

Seperti diketahui, selama ini profesi hakim yang menyandang status pejabat negara hanyalah Hakim Agung. Menurut politisi Gerindra tersebut, usulan tersebut akan mempunyai konsekuensi baik dari segi karir maupun fasilitas, termasuk anggaran.

"Ini masih menjadi perdebatan sekarang di Fraksi DPR, siapakah yang menjadi pejabat negara dalam RUU Jabatan Hakim ini. Apakah semua hakim bisa dikategorikan pejabat negara atau tidak, mengingat jumlah hakim saat ini melebihi angka 7000," ungkap Ketua Panja RUU Jabatan Hakim itu.

Di waktu yang sama, anggota Baleg Junimart Girsang (F-PDIP) menyampaikan hal senada. Ia mengungkapkan banyak aspek yang harus



Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas

dipenuhi apabila usulan tersebut dijalankan. Salah satunya ialah mengcover kebutuhan hidup hakim sehingga keputusan hakim di Pengadilan tidak diintervensi oleh kepentingan lain.

"Hakim ini kan independen, harus bebas dari segala kepentingan. Nanti semua hakim akan menjadi pejabat negara, maka semua kebutuhannya harus dipenuhi. Bagaimana mungkin seorang hakim bebas atau independen jika untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anaknya saja dia masih berpikir," jelasnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Tenaga Ahli yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura) dikemukakan beberapa isu penting lainnya, diantaranya berkaitan dengan manajemen jabatan hakim mulai dari proses rekrutmen, syarat-syarat menjadi hakim serta pendidikan yang harus ditempuh setelah menjadi hakim untuk dipromosikan.

Selanjutnya, bagaimana mengatur pengawasan hakim menjadi lebih baik. Misalnya,

membedakan tugas dan kewenangan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Sebagaimana diketahui, selama ini belum ada keterpaduan soal pengawasan antara MA dan KY. ■

(ann,mp) foto: jayadi/hr

Museum Jangan Sampai Dimuseumkan

Kondisi museum kian memprihatinkan, karena minimnya perhatian dari Pemerintah. Padahal, museum adalah tempat disimpannya warisan budaya bangsa Indonesia yang harus betul-betul dijaga dan hormati.

Museum dapat menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, usai RDPU dengan Asosiasi Museum Indonesia (AMI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/05). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya (F-PD).

"Museum menjadi pintu masuk setiap wisatawan ketika datang ke daerah, untuk berkunjung ke museum, dan menjadi target dari pemasaran. Museum menjadi harapan kita agar peradaban bangsa menjadi kebanggaan. Oleh karena itu, museum jangan sampai juga dimuseumkan," kata Sutan.

Politisi yang akrab dipanggil SAH juga mengapresiasi semangat AMI yang baru kali ini rapat dengan Komisi X DPR. Ia juga menekankan, AMI merupakan mitra kerja yang strategis bagi Komisi X dan sekaligus mitra kerja Komisi X DPR lainnya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Kita memberikan dukungan penuh kepada AMI, untuk melakukan konsolidasi. Oleh karenanya, kedepan kita mengharapkan ke Pemerintah, museum jangan hanya menjadi pelengkap, tapi menjadi langkah yang tepat, apalagi kita ingin mengangkat peradaban bangsa," tegas Sutan.

Politisi F-Gerindra itu menilai, masih ada beberapa permasalahan terkait permuseuman Indonesia. Diantaranya belum ada payung hukum yang menjadi landasan dari museum. Sehingga, dari sisi anggaran pun belum terlihat maksimal.

"AMI bekerja dengan uang sendiri. Negara harus hadir dalam menyelesaikan permasalahan museum, dari sudut

infrastrukturnya, pembinaan SDM, dan lainnya, sehingga menjadi kebanggaan daerah," saran Sutan.

Terkait UU ini, Sutan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas RUU Kebudayaan, dimana didalamnya akan juga diatur tentang



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

pembinaan terhadap museum. Harapannya, UU ini memiliki keterkaitan dengan pembenahan museum.

Politisi asal dapil Jambi ini juga berjanji akan melakukan konsolidasi dengan mitra kerja terkait, agar permasalahan permuseuman dapat ditindaklanjuti. Salah satunya Bekraf, sehingga nantinya adanya museum dapat dipromosikan oleh badan yang dipimpin oleh Triawan Munaf itu.

"Kita mendorong agar museum di daerah terus menjadi dambaan semua rakyat Indonesia. Ketika seseorang berkunjung ke daerah, maka yang dituju pertama adalah museum. Dari sudut anggaran akan kita bicarakan dengan

kementerian terkait, sehingga permuseuman tidak lagi menjadi hidup segan mati tak mau," kata Sutan, yang juga mengaku mendukung agar Gerakan Cinta Museum dapat digalakkan kembali.

Sementara itu, kekecewaan juga diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR Isma Yatun. Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai, Pemerintah Provinsi kurang memprioritaskan museum. Akibatnya, kondisi museum ketinggalan dan memprihatinkan.

"Museum akan diberikan anggaran, jika ada sisa anggaran. Padahal museum itu simbol peradaban," kata politisi asal dapil Lampung ini yang juga mendukung disusunnya UU Permuseuman.

Sementara itu sebelumnya, Ketua Umum AMI Putu Supadma Rudana mengatakan, saat ini ada 426 museum di seluruh Indonesia. Ironisnya, banyaknya jumlah museum itu hanya dianggarkan sebesar Rp 61 miliar per tahun.

"Anggaran yang lemah, sehingga tidak ada peningkatan sumber daya manusia. Belum lagi masih banyak museum yang belum

memiliki kurator yang baik. Manajemen museum juga sangat lemah," jelas Putu.

Dalam kesempatan ini, pihaknya mengajukan beberapa rekomendasi, diantaranya pembentukan Badan Permuseuman, penyusunan UU Permuseuman, dan pembentukan Lembaga Sertifikasi dan Akreditasi Permuseuman.

Kemudian, penempatan SDM Museum sesuai dengan kompetensinya, kebijakan penganggaran yang komprehensif, penguatan kelembagaan museum Indonesia, dan Gerakan Nasional Cinta Museum yang perlu digiatkan kembali. ■

Peningkatan Minat Baca Jadi Bagian Perubahan Pola Pikir

Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana meyakini, peningkatan minat baca masyarakat Indonesia akan menjadi bagian dari perubahan pola pikir. Selama masyarakat Indonesia tidak didorong untuk membaca, maka Bangsa Indonesia akan terus tertinggal.

Demikian ditegaskannya usai RDP dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Dedi Junaedi beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/5).

"Kita harus punya langkah progresif untuk membangun perpustakaan ke depannya, ketika kita ingin meningkatkan minat baca di masyarakat. Apalagi, tema kita adalah bagaimana meningkatkan daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," tegas Dadang.

Politisi F-Hanura itu juga prihatin dengan kondisi perpustakaan yang tidak dikelola dengan baik oleh pustakawan yang tersertifikasi. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya minat baca masyarakat.

"Saya menginginkan dan menantang PNRI untuk membuat pemetaan ke depan, berapa SDM yang dibutuhkan untuk mengelola

perpustakaan, berapa perpustakaan yang harus dibangun, sehingga perpustakaan dapat menjadi pusat budaya, bukan hanya perkumpulan buku. Perubahan itu dari perpustakaan," imbuh Dadang.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga prihatin dengan rencana pemotongan atau penghematan anggaran yang ditujukan kepada PNRI. Padahal, selain anggaran yang memang sudah kecil, PNRI memiliki peranan penting dalam mencerdaskan bangsa.

"Jangan sampai pemangkasan anggaran ini berdampak pada menurunnya minat baca dan membuat kita ketinggalan dengan negara tetangga. Hal ini akan berdampak signifikan. Kalau ingin meningkatkan minat baca, anggaran jangan dipotong," pesan Dadang.

Sementara itu Plt. Kepala PNRI Dedi Junaedi sebelumnya memaparkan hasil pemeriksaan BPK RI pada PNRI sampai dengan Semester II Tahun 2015, terdapat permasalahan yakni 6 temuan dalam sistem pengendalian intern sebesar Rp 3,1 miliar, dan 9 temuan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp 943 miliar.

"Terhadap permasalahan dan nilai temuan itu, PNRI telah menindaklanjutinya secara keseluruhan sesuai rekomendasi dan telah

menyampaikan bukti-bukti lanjut kepada BPK," jelas Dedi.

Dedi menambahkan, dari permasalahan dan temuan itu, terdapat temuan yang berpengaruh langsung terhadap tata kelola keuangan, yaitu belum tertibnya pencatatan aset kolekai PNRI yang berasal dari pelaksanaan UU No 4 tahun 1990 tentang SSKCR, dan pencatatan aset tanah Perpustakaan Bung Karno melalui Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

"Hal ini terjadi karena terdapat beberapa hambatan, yakni kesulitan dalam menaksir harga bahan perpustakaan yang tidak mencantumkan harga buku, karena kewenangan menaksir harga ada pada Kementerian Keuangan," jelas Dedi.

Terkait permasalahan dan hambatan itu, Komisi X mendorong PNRI untuk tetap melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu untuk memutuskan harga buku koleksi PNRI dan memastikan waktu penyelesaiannya.

Sementara terkait penghematan atau pemotongan anggaran yang dialami PNRI sebesar Rp 88,8 miliar, sehingga kini pagu APBN PNRI TA 2016 menjadi Rp 612 miliar dari semula Rp 701 miliar, Komisi X meminta agar penghematan atau pemotongan anggaran itu tidak merubah rencana strategis program pengembangan perpustakaan yang telah ditentukan dan tidak mengurangi kualitas kinerja PNRI, khususnya program minat baca dan pengembangan SDM. Rapat juga menghasilkan kesimpulan, Komisi X DPR mendorong PNRI agar pada tahun yang akan datang dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).■

(s/f) Foto: Akbar/hr



Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana



BERITA BERGAMBAR



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima dua penghargaan dari Puri Agung Negara Jembrana Bali, Sabtu (21/5) Foto : Hamdis/hr



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Deding Ishak foto bersama dengan korban longsor di relokasi perumahan Lateri Indah Maluku, Senin (23/5) foto : iwan/hr



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Sodik Mudjahid kunjungi masyarakat yang mendapatkan bantuan Kemensos di Tarakan, Kaltara Senin (23/5) foto : jaka/hr



Suasana Apel Bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional diikuti Karyawan Setjen MPR, DPR dan DPD RI Jumat, (20/5) Foto : Runi, Jaka/hr



Kepala Badan Keahlian DPR menyampaikan mekanisme dukungan terhadap Alat Kelengkapan Dewan dalam pembentukan Undang-Undang Jumat (27/5) Foto: Kresno/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di 08119443344

@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI